

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sektor publik di Indonesia terdapat dua lembaga pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu audit eksternal dan audit internal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi sebagai auditor eksternal yang merupakan badan tertinggi dalam pemeriksaan keuangan di Indonesia, sedangkan, fungsi audit internal dalam pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat.

Audit internal merupakan sebuah fungsi penilaian independen yang dijalankan didalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian intern. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 192/2014 tentang BPKP, BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab pada Presiden bertugas untuk melakukan pengawasan intern pemerintahan. Dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan, pengawasan intern merupakan unsur penting dalam manajemen. Pengawasan internal diperlukan untuk mengenali dan melakukan tindakan preventif dini atas kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

APIP harus mampu mengenali perubahan dan merespon permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai APIP membantu mewujudkan akuntabilitas

pelaporan keuangan negara dan daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Peran BPKP yang dijalankan dengan optimal akan turut membantu terciptanya *good publik governance*.

Fenomena dilapangan dijumpai belum baiknya kualitas hasil audit antara lain :

1. Dalam beberapa pelaksanaan penugasan audit masih terdapat auditor yang belum bersertifikat ahli.
2. Pembatasan ruang lingkup sumber dana yang akan diaudit yaitu sebatas dana yang berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN);
3. Pembatasan hari pemeriksaan (hp) dalam pelaksanaan audit di lapangan;

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan diperlukan independensi, kompetensi, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja untuk menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas. Independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan karena selain mematkan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan, juga untuk mencapai harapan yakni kinerja yang berkualitas. Independensi berarti sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi. Sebagai seorang Akuntan Publik tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh kepentingan siapapun baik manajemen maupun pemilik perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Akuntan publik harus bebas intervensi utamanya dari kepentingan-kepentingan yang menginginkan tidak ada hasil audit yang merugikan pihak yang berkepentingan (Putu, 2014).

Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan obyektifitas auditor. Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya”. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat, (Nur, 2013).

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan masyarakat. Sikap mental independen auditor menurut masyarakat inilah yang tidak mudah diperoleh olehnya. Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka (Norma, 2012).

Sikap independen menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mudah untuk dapat terus menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya. Banyak situasi dilema etis yang menyebabkan akuntan tidak dapat independen,

misalnya saat ada hasil temuan auditor yang tidak sesuai dengan harapan klien sehingga auditor dan audite tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan (konflik audit). Padahal independensi merupakan kode etik yang harus dipegang teguh oleh auditor karena seberapa baik pun hasil audit yang telah dilakukan auditor akan menjadi tidak berarti jika independensinya terganggu karena ia tidak akan bisa mengungkapkan pendapatnya secara bebas (Alfiah, 2014).

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas (Nur, 2013).

Setiap pekerjaan profesional membutuhkan kompetensi tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Masyarakat akan sangat menghargai suatu profesi, bila orang yang berkecimpung didalamnya memiliki kompetensi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, maka kualitas

audit yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, (Rachamawati, 2016). Dari data yang diperoleh, diketahui jumlah tenaga Auditor BPKP di Perwakilan Sumbar dan Riau sebanyak 225 orang yang memiliki kompetensi yang berbeda, secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kompetensi Auditor BPKP di Perwakilan Sumbar dan Riau

No	Kompetensi	Jumlah
1	Akuntansi	156
2	Manajemen	35
3	Lainnya	34
	Jumlah	225

Sumber: Data Kepegawaian BPKP, Tahun 2016

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa tenaga auditor BPKP di dua Perwakilan, memiliki kompetensi yang berbeda dalam jenjang pendidikannya. Terutama auditor yang memiliki kompetensi manajemen dan lainnya ini akan memperngaruhi kualitas hasil audit yang mereka lakukan.

Selain berkompentensi, seorang auditor harus berkewajiban mempertahankan sikap independensi dalam pelaksanaan audit. Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor akan berkaitan dengan etika. Untuk menunjang kompetensi dan independensi, faktor utama yang mempengaruhi kualitas audit adalah tingkat pendidikan formal auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dengan memiliki pendidikan formal yang baik dapat meningkatkan sumber daya manusia dan akan berpengaruh pada hasil audit. Menurut Cheng *et.al* (2009); Pebryanto (2013:2) menyarankan bahwa capaian pendidikan pada auditor dapat meningkatkan kualitas dari audit pemerintahan, serta pencapaian pendidikan menjamin kualitas tenaga kerja. Menurut Sikula (2003:50) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur

sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja managerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.

Tingkat pendidikan juga sangat diperlukan dalam menentukan kualitas audit. Semakin banyak pengetahuan yang didapat maka akan memudahkan auditor dalam memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas audit. Menurut Pebryanto (2013), pendidikan adalah kegiatan untuk memperbaiki dan mengembangkan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengertian tentang pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi termasuk didalamnya peningkatan pengetahuan teori dan ketrampilan dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan. Dari data yang diperoleh, diketahui jumlah tenaga Auditor BPKP di Perwakilan Sumbar dan Riau sebanyak 225 orang yang memiliki jenjang pendidikan yang berbeda, secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Tenaga Auditor BPKP di Perwakilan Sumbar dan Riau

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana/S2	19
2	Sajarna/S1	155
3	Diploma	51
	Jumlah	225

Sumber: Data Kepegawaian BPKP , Tahun 2016

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja seseorang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat pengalaman seseorang maka hasil pekerjaan yang dihasilkan akan semakin bagus (Masrizal, 2010). Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut

untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens dkk., 2008). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Dari data yang diperoleh, diketahui jumlah tenaga Auditor BPKP di Perwakilan Sumbar dan Riau sebanyak 225 orang yang memiliki pengalaman yang berbeda, secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Pengalaman Kerja Auditor BPKP di Perwakilan Sumbar dan Riau

No	Pengalaman Kerja	Jumlah
1	<5 tahun	42
2	5 – 10 tahun	59
3	10 – 15 tahun	29
4	>15 tahun	95
	Jumlah	225

Sumber: Data Kepegawaian BPKP, Tahun 2016

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak tenaga auditor yang memiliki pengalaman kerja di bawah 5 tahun. Hal ini diduga akan mempengaruhi hasil kualitas audit BPKP.

Etika profesi juga salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kode etik juga sangat diperlukan karena dalam kode etik mengatur perilaku akuntan publik menjalankan praktik. Halim (2008: 29) mengungkapkan etika profesional meliputi sikap para anggota profesi agar idealistis, praktis dan realistis. Akuntan publik juga harus mematuhi kodek etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan

sesama anggota maupun masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Hasil penelitian Ayu (2015) menunjukkan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, independensi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, obyektivitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, akuntabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, dan secara simultan kompetensi, independensi, obyektivitas, integritas, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah. Danang Febri Prasetyo (2010), hasil penelitian menunjukkan independensi, kompetensi, integritas, obyektivitas, dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan demikian maka, semakin tinggi independensi, kompetensi, integritas, obyektivitas serta pengalaman kerja, maka semakin tinggi atau semakin baik kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Kemudian hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,613 menunjukkan bahwa 61,3% variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel independensi, kompetensi, integritas, obyektivitas, dan pengalaman kerja, sedangkan sisanya sebesar 38,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Andri (2015) menunjukkan kompetensi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan profesionalisme

berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas audit. M. Nizarul Alim (2007) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dimana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan. Sementara itu, interaksi kompetensidan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitasaudit. Pengaruh interaksi kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit dalam penelitian ini tidak dapat diketahui karena dari hasil pengujian ternyata kedua variabel tersebut keluar dari model (Excluded Variables). Menurut Cheng et al. (2009) dalam Pebryanto (2013), menyarankan bahwa capaian pendidikan pada auditor dapat meningkatkan kualitas dari audit pemerintahan, serta pencapaian pendidikan menjamin kualitas tenaga kerja

Hasil penelitian Sukriah, dkk (2009) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan (Alim dkk, 2007).

Berdasarkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Kompetensi, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Auditor BPKP di Sumbar dan Riau)”**.

1.2 Perumusan Masalah

BPKP sebagai auditor intern pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan *good governance* (pemerintah yang baik) melalui pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan yang transparan dan bebas dari KKN. Untuk itu diperlukan pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas hasil audit. Pada penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
5. Apakah interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
6. Apakah interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
7. Apakah interaksi tingkat pendidikan dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
8. Apakah interaksi pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
2. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

3. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
4. Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
5. Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
6. Interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
7. Interaksi tingkat pendidikan dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
8. Interaksi pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas hasil audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca dan khususnya penulis atas pengaruh independensi, kompetensi, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit dengan etika auditor sebagai variabel moderator .
2. Memberi gambaran yang obyektif atas pengaruh independensi, kompetensi, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit dengan etika auditor sebagai variabel moderator
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk BPKP untuk lebih menekankan peningkatan kualitas hasil audit.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis menguraikan secara singkat isi materi pokok yang dibahas dalam setiap bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan .

Bab kedua merupakan landasan teori , pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Bab ini berisi landasan teori tentang, kualitas audit, etika auditor, independensi, kompetensi, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, uji kelayakan model, , teknik pengujian asumsi klasik, dan teknik pengujian hipotesis.

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan. Bab ini berisi tentang prosedur pengumpulan data, demografi responden, uji instrumen data, deskripsi data, uji asumsi klasik, hasil analisis regresi berganda, dan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan , implikasi dan saran.